

ABSTRAK

RYAN ERISTA

Pembangunan adalah usaha untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Sebagaimana diketahui, Negara Indonesia merupakan suatu negara yang sedang berkembang yang sedang membangun, dimana pada saat ini sedang giat melaksanakan pembangunan disegala bidang, baik pembangunan di bidang fisik maupun di bidang non fisik.

Permasalahannya adalah pengaturan hak dan kewajiban dalam melakukan perjanjian kerjasama menurut hukum perdata di Indonesia, akibat hukumnya manakala salah satu pihak melakukan wanprestasi dalam suatu perjanjian pasca selesainya pekerjaan serta Pertimbangan hakim atas pembagian waris dalam Putusan Mahkamah pertimbangan hukum hakim atas wanprestasi karena kelalaian melakukan pembayaran pasca selesainya pekerjaan dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3120 K/Pdt/2022

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif. "Pendekatan yuridis normatif yaitu menekankan pada ilmu hukum dengan menitik beratkan pada data sekunder, untuk melengkapi data dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan yang relevan dan melakukan studi pustaka yang selanjutnya data akan dianalisis secara yuridis.

Disimpulkan bahwa Pengaturan hak dan kewajiban dalam melakukan perjanjian kerjasama menurut hukum perdata di Indonesia Adanya perjanjian kerja yang bersesuaian dengan Undang-Undang 13 Tahun 2003 dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum antara pekerja dengan pengusaha, perjanjian kerja dapat dikatakan syarat atau aturan seorang pekerja dengan pengusaha disebuah perusahaan. Akibat hukumnya manakala salah satu pihak melakukan wanprestasi dalam suatu perjanjian pasca selesainya pekerjaan Debitur yang melakukan wanprestasi berdasarkan pada perikatan akan menerima akibat hukum atau sanksi hukum, yaitu: Menurut ketentuan Pasal 1243 KUHPperdata, debitur diwajibkan membayar ganti kerugian yang telah diderita oleh kreditur, Pertimbangan hukum hakim atas wanprestasi karena kelalaian melakukan pembayaran pasca selesainya pekerjaan dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3120 K/Pdt/2022 permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Ketua Perhimpunan Penghuni Apartemen Taman Rasuna atau Ketua Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun Apartemen Taman Rasuna tersebut harus ditolak; Bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini

Kata Kunci : Wanprestasi, Pembayaran, Pekerjaan.

ABSTRACT

RYAN ERISTA

Development is an attempt to create prosperity and welfare of the people. As is well known, the State of Indonesia is a developing country that is developing, which is currently actively carrying out development in all fields, both development in the physical and non-physical fields.

The problem is the arrangement of rights and obligations in entering into cooperation agreements according to civil law in Indonesia, the legal consequences are when one party defaults on an agreement after the completion of work and the judge's consideration of the distribution of inheritance in the Court Decision the judge's legal considerations of default due to negligence in making post-completion payments work in the Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 3120 K/Pdt/2022

This research is descriptive with a normative juridical approach. "The normative juridical approach is emphasizing legal science with an emphasis on secondary data, to complete the data is done by collecting relevant materials and conducting literature studies where the data will then be analyzed juridically.

It is concluded that the arrangement of rights and obligations in entering into cooperation agreements according to civil law in Indonesia. The existence of a work agreement in accordance with Law 13 of 2003 can provide protection and legal certainty between workers and employers, work agreements can be said to be conditions or rules for a worker and an entrepreneur in a company. The legal consequences when one of the parties defaults in an agreement after the completion of work. judge for default due to negligence in making payments after the completion of work in the Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 3120 K/Pdt/2022 the appeal filed by the Cassation Petitioner: Chairman of the Taman Rasuna Apartment Residents Association or Head of the Owners and Occupants Association of the Taman Rasuna Apartment Unit must be rejected; Whereas because the cassation petition of the Cassation Petitioner was rejected, the Cassation Petitioner was sentenced to pay court fees at this cassation level

Keywords: Default, Payment, Employment.